

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Putu Krisliani¹
Ni Putu Wiwin Setyari²

^{1,2}FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi probleme kependudukan yang berkelanjutan baik secara nasional maupun regional. Salah satu persoalan mendasar yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu wilayah kemiskinan merupakan salah satu indikator yang paling mudah digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011-2019. Penelitian ini dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder metode pengumpulan data dilakukan secara observasi non perilaku dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan jumlah pengamatan sebanyak 81 sampel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, pendidikan, dan kesehatan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan

JEL : I32, Q56, E24, I20, I10

ABSTRACT

Poverty has long been a continuing population problem, both nationally and regionally. One of the fundamental problems that are complex and multidimensional. In assessing the level of welfare in an area, poverty is one of the easiest indicators to use. The purpose of this study was to determine the effect of population growth, unemployment, education, and health partially and simultaneously on the level of poverty in the regencies / cities of Bali Province in the period 2011-2019. This research was conducted in all districts / cities of Bali Province using secondary data. Data collection methods were carried out by non-behavioral observation and in-depth interviews. The analysis technique used is Multiple Linear Regression with a total of 81 samples. Based on the research results, it shows that population growth, unemployment, education, and health simultaneously have a significant effect on poverty in the Regency / City of Bali Province. The results showed that population growth, education, and health partially had a negative and significant effect on poverty, while the unemployment variable had a significant positive effect on poverty in the districts / municipalities of Bali Province.

Keyword: Poverty, Population Growth, Unemployment, Education, Health

JEL : I32, Q56, E24, I20, I10

PENDAHULUAN

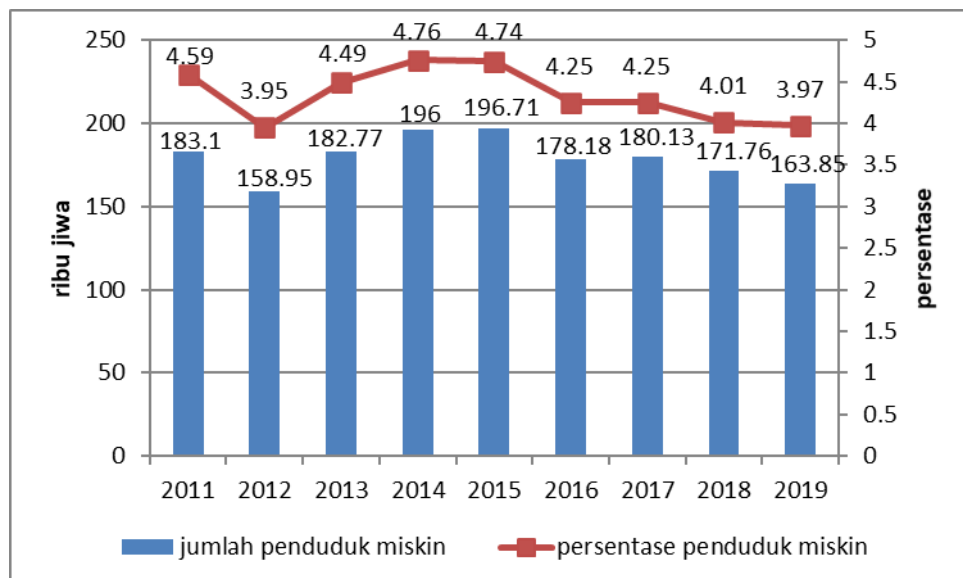
Kemiskinan adalah salah satu permasalahan mendasar yang kompleks dan multidimensional, yang berkaitan dengan kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun kebutuhan lainnya (Sudibia dan Marhaeni (2013). Hal ini kemudian menjadi pusat perhatian pemerintah di setiap negara. Indonesia menghadapi masalah *triple track problems* yaitu penurunan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan pendapatan yang tidak merata (Tim Komite Ekonomi Nasional, 2014). Franca (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan manusia makhluk hidup dengan sedikit atau tanpa makanan, perlindungan air, energi, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan sarana kehidupan fisik lainnya yang meningkatkan kehidupan seseorang. Orang miskin terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak berujung pangkal disebut dengan lingkaran setan atau *vicious circle* (Seran, 2017). Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhnya standar kualitas hidup (Werner, 2015).

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki penduduk miskin dengan tingkat kemiskinan cukup rendah dibandingkan dengan kemiskinan nasional. Adapun sumber pendapatan berasal dari sektor pertanian dalam arti luas, dan sektor pariwisata yang berbasiskan nilai – nilai budaya, sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung perekonomian Bali. Kendati demikian, permasalahan kemiskinan masih terjadi meski perekonomiannya sudah maju. Data jumlah dan persentase penduduk miskin di Bali dapat dilihat pada

gambar 1. Semula pada tahun 2011 sebesar 183.1 ribu jiwa (4.59 persen) namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan secara drastis hal ini disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan garis kemiskinan.

Terbukti imbas naiknya harga BBM pada tahun 2013 kemiskinan di Provinsi Bali meningkat di tahun 2014 sekaligus dengan persentase tertinggi yaitu mendekati 4.8 persen. Pada tahun 2016 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan karena penurunan harga-harga kebutuhan pokok, selain itu kenaikan upah buruh tani juga menjadi alasan turunnya angka kemiskinan. Kemudian tiga tahun terakhir (2017-2019) relatif mengalami penurunan, terlihat penduduk miskin pada tahun 2019 tercatat sebanyak 163.85 ribu jiwa (3.97 persen) jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 16.28 ribu jiwa (-0,28 persen) pada tahun 2018-2017.

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali



Sumber: *Data diolah, 2020*

Sumner (2015) menyebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan pendapatan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan pokok di setiap daerah, termasuk di Provinsi Bali dimana fluktuasi angka persentase penduduk miskin yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, pembangunan yang tidak merata, dan akses menuju sumber daya ekonomi sulit dijangkau.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Kabupaten/Kota Tahun 2011- 2019

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota									Rata- rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Jembrana	6.56	5.74	5.56	5.83	5.84	5.33	5.38	5.20	4.88	5.59
Tabanan	5.62	4.90	5.21	5.61	5.52	5.00	4.92	4.46	4.21	5.05
Badung	2.62	2.16	2.46	2.54	2.33	2.06	2.06	1.98	1.78	2.22
Gianyar	5.40	4.69	4.27	4.57	4.61	4.44	4.46	4.19	3.88	4.50
Klungkung	6.10	5.37	7.01	7.01	6.91	6.35	6.29	5.86	5.40	6.25
Bangli	5.16	4.52	5.45	5.86	5.73	5.22	5.23	4.89	4.44	5.16
Karangasem	6.43	5.63	6.88	7.30	7.44	6.61	6.55	6.28	6.25	6.59
Buleleng	5.93	5.19	6.31	6.79	6.74	5.79	5.74	5.36	5.19	5.89
Denpasar	1.79	1.52	2.07	2.21	2.39	2.15	2.27	2.24	2.10	2.08
Provinsi Bali	4.59	3.95	4.49	4.76	4.74	4.25	4.25	4.01	3.79	4.31

Sumber: *Data diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 1, persentase penduduk miskin masih mengalami disparitas (ketimpangan) antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali terlihat dari Kabupaten Karangasem yang mendominasi angka rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi yaitu 6,59 persen hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan, sementara Kota Denpasar

masih menjadi daerah dengan rata-rata persentase penduduk miskin terendah yaitu 2,08 persen. Ketimpangan antar wilayah tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masih belum dinikmati oleh seluruh masyarakat di Bali dimana masalah ini harus diselesaikan agar kesejahteraan dapat diperoleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun ternyata masih terjadi tindak korupsi yang dilakukan para pejabat sehingga menghambat pelaksanaan program secara menyeluruh karena anggaran yang meningkat membuat korupsi juga meningkat (Palupi dan Adis, 2019).

Faktor pertama yang mempengaruhi persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk. Setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda yang menyebabkan angka pertumbuhan di tiap daerah berbeda. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak pada bidang ekonomi, sosial, politik dan pertahanan negara di dalam hal kependudukan (Arynda, 2020). Dikutip dari Paulus (2016), ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu daerah yaitu jumlah kelahiran (fertilitas), jumlah kematian (mortalitas), dan migrasi. Ketiga faktor tersebut pada dasarnya dibedakan atas dua faktor yakni penambahan alamiah dan migrasi neto. Jeon (2013) berpendapat bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi sehingga pendapatan perkapita daerah menjadi rendah dan akibatnya jumlah penduduk miskin meningkat.

Melihat dari segi Pendidikan, kemiskinan dapat terjadi karena tingkat Pendidikan yang rendah. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam

pembangunan karena berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia (Purnami, 2016). Pokharel (2015) menjelaskan bahwa pendidikan dapat mengurangi kemiskinan sementara kemiskinan dapat membatasi akses terhadap Pendidikan. Kemiskinan di Indonesia umumnya disebabkan oleh rendahnya Pendidikan, dimana semakin rendah pendidikan seseorang maka gaji atau upah yang diterima akan semakin rendah, untuk itu penting bagi seseorang memiliki pendidikan yang layak guna meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

Leker (2015) mengungkapkan bahwa Kesehatan adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana salah satu indikator melihat Kesehatan di suatu daerah melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut Yefriza (2015), pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menjadi faktor penting dalam penurunan angka kematian bayi dan anak, serta peningkatan AHH. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori, hal ini tentunya juga sangat berpengaruh baik pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang nantinya tercermin dengan meningkatnya AHH di suatu daerah.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun yang tidak terlepas dari permasalahan ini. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang semakin serius. Ordine dan Rose (2015) mengungkapkan perspektif pekerja yang memiliki tahun studi lebih lama adalah memiliki

kemungkinan tinggi untuk menjadi pengangguran dari pada lulus tepat waktu. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap, Meskipun demikian, terjadinya pengangguran bukan hanya semata-mata akibat adanya kelebihan tenaga kerja akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, seperti kualitas angkatan kerja dan distorsi dalam pasar kerja. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas, dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya (Ria Suadnyani,2018).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali belum merata dan masih adanya ketimpangan penurunan tingkat kemiskinan yang cukup jauh antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan dilihat dari segi Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan.

Jenis data yang digunakan yaitu data panel pada tahun 2011-2019 dengan mengambil 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali sehingga jumlah titik pengamatan

81 sampel, serta data lainnya yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, artikel, buku, dan literature lainnya yang terkait dengan variabel dari penelitian ini. Adapun sumber data diperoleh dari artikel, website, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi non perilaku dan metode wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Hasil Penelitian

Kemiskinan

Provinsi Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat, namun di tengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, tidak memungkinkan adanya penduduk miskin.

**Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2011-2019 (persen)**

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	6.56	5.74	5.56	5.83	5.84	5.33	5.38	5.20	4.88
Tabanan	5.62	4.90	5.21	5.61	5.52	5.00	4.92	4.46	4.21
Badung	2.62	2.16	2.46	2.54	2.33	2.06	2.06	1.98	1.78
Giayar	5.40	4.69	4.27	4.57	4.61	4.44	4.46	4.19	3.88
Klungkung	6.10	5.37	7.01	7.01	6.91	6.35	6.29	5.86	5.40
Bangli	5.16	4.52	5.45	5.86	5.73	5.22	5.23	4.89	4.44
Karangasem	6.43	5.63	6.88	7.30	7.44	6.61	6.55	6.28	6.25
Buleleng	5.93	5.19	6.31	6.79	6.74	5.79	5.74	5.36	5.19
Denpasar	1.79	1.52	2.07	2.21	2.39	2.15	2.27	2.24	2.10

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020*

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu 2011-2019 mengalami kenaikan dan

penurunan persentase. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menduduki angka persentase terendah sedangkan Kabupaten Karangasem menduduki angka persentase tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan persebaran penduduk miskin pada tingkatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Hasil wawancara terhadap salah satu staff BPS Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

“Kemiskinan di Bali pada tingkatan kabupaten/kota tentunya ketimpangannya tidak bisa dihindari, dimana sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas umum, dan lain sebagainya menjadi dasar perbedaan kondisi kemiskinan antar daerah. Meskipun demikian, yang patut disadari bahwa tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota sudah menggambarkan kondisi kemiskinan yang semakin membaik. Tentunya dibalik itu sisa kemiskinan yang ada ini bisa dibilang sebagai kerak-kerak kemiskinan pada umumnya cenderung susah diturunkan lagi tapi memang sisa yang tinggal sedikit itu sangat sulit diturunkan pada level tertentu misalnya 1% karena kerak itu mungkin adalah penduduk miskin yang sudah tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa diantara mereka yang miskin pada kondisi kerak kemiskinan ini, misalnya orang yang sudah tua, tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengakses perekonomian, juga ada yang secara fisik memiliki keterbatasan”.

Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah menggambarkan banyaknya kebutuhan yang diperlukan di wilayah tersebut, sedangkan informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk berguna untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Sehingga, berdasarkan informasi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah, banyaknya kebutuhan dasar penduduk saat ini dan pada masa yang akan datang dapat diperkirakan.

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi
Bali tahun 2011-2019 (persen)**

Kabupaten/ Kota	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	1.31	1.22	1.13	1.09	0.74	0.63	0.59	0.70	0.68
Tabanan	1.24	1.15	1.05	1.02	0.70	0.60	0.57	0.66	0.64
Badung	4.86	4.41	4.19	4.06	2.15	2.21	2.14	2.40	2.36
Gianyar	1.87	1.76	1.65	1.60	1.04	0.91	0.86	0.99	0.97
Klungkung	1.08	0.98	0.88	0.85	0.59	0.57	0.40	0.56	0.55
Bangli	1.07	1.07	0.98	0.96	0.65	0.54	0.58	0.62	0.60
Karangasem	1.88	0.98	0.89	0.87	0.60	0.51	0.49	0.57	0.55
Buleleng	2.03	1.13	1.04	1.01	0.69	0.60	0.54	0.65	0.63
Denpasar	3.98	3.82	3.64	3.53	2.20	1.90	1.89	2.09	2.06

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020*

Hasil perolehan data pertumbuhan penduduk tiap daerah di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda di tiap tahunnya. Perkembangannya pada tahun 2011 hingga 2019 Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki angka persentase laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya komponen pertumbuhan penduduk.

Pengangguran

Pengangguran umumnya lebih banyak terjadi di daerah perkotaan akibat adanya industrialisasi. Pengangguran dapat terjadi karena ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Hal ini diakibatkan karena permintaan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan penawaran kerja.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2019 (persen)

Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	3.53	1.97	3.46	2.95	1.59	1.59	0.67	1.38	1.42
Tabanan	2.80	2.18	0.80	2.25	1.73	1.73	1.79	1.43	1.28
Badung	2.28	1.67	0.80	0.48	0.34	0.34	0.48	0.44	0.38
Gianyar	2.11	1.81	2.23	1.43	1.93	1.93	1.02	1.60	1.42
Klungkung	2.35	2.09	2.08	1.94	1.39	1.39	0.94	1.41	1.54
Bangli	0.81	0.90	0.77	0.67	1.72	1.72	0.48	0.80	0.72
Karangasem	2.70	1.31	1.39	2.06	2.15	1.15	0.72	0.99	0.60
Buleleng	3.28	3.13	2.15	2.74	2.04	2.04	2.41	1.85	3.02
Denpasar	4.56	2.57	2.72	2.32	3.54	3.54	2.63	1.82	2.22

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020*

Selama kurun waktu 2011-2019 tingkat persentase pengangguran terbuka per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi setiap tahunnya di beberapa daerah, juga menunjukkan adanya disparitas penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di dua daerah yakni berada di Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar tingkat persentase ini masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, hal ini dikarenakan rendahnya kesempatan kerja yang diperoleh masyarakat. Masih tingginya tingkat pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan nantinya, sehingga perlu adanya dorongan dari pemerintah misalnya seperti terbukanya lapangan pekerjaan.

Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga ketika penduduk tersebut memiliki kualitas yang baik, tentu akan meningkatkan produktivitasnya. Rata-rata lama sekolah salah satu indikator dalam pengukuran tingkat pendidikan suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah mengukur kesempatan pendidikan setiap individu yang dimulai pada usia 7 tahun

dan menjadi indikator lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang.

**Tabel 5. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2011-2019 (tahun)**

Kabupaten/ Kota	Rata - Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	7.23	7.25	7.27	7.30	7.54	7.59	7.95	7.95	8.22
Tabanan	7.68	7.76	7.83	7.91	8.07	8.10	8.43	8.64	8.87
Badung	8.96	9.07	9.18	9.29	9.44	9.90	9.99	10.06	10.38
Gianyar	7.73	7.99	8.24	8.28	8.49	8.86	8.87	8.92	8.94
Klungkung	6.68	6.81	6.88	6.90	6.98	7.06	7.46	7.75	8.12
Bangli	5.67	6.01	6.35	6.38	6.41	6.44	6.80	7.13	7.16
Karangasem	4.60	5.22	5.34	5.39	5.42	5.48	5.52	5.97	6.31
Buleleng	6.39	6.51	6.63	6.66	6.77	6.85	7.03	7.04	7.08
Denpasar	10.59	10.82	10.90	10.96	11.02	11.14	11.15	11.16	11.23

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020*

Capaian pendidikan dalam hal rata-rata lama sekolah yang dapat diraih oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang terbilang cukup bervariasi. Selama kurun waktu tahun 2011-2019 rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kota Denpasar. Hal ini jelas dikarenakan Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali dimana secara pasti pembangunan pendidikannya memiliki sarana-prasarana yang lebih baik dan merata dibanding Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Sedangkan capaian angka rata-rata lama sekolah yang paling rendah berada pada Kabupaten Karangasem walaupun demikian dalam kurun waktu 2011-2019 Kabupaten Karangasem berhasil meningkatkan angka rata-rata lama sekolah namun tetap saja capaian angka ini masih dibawah daerah lainnya.

Kesehatan

Jika capaian kesehatan dapat diraih dengan baik, tentu saja hal ini berdampak pada produktivitas penduduk yang baik juga untuk menjalankan roda

perekonomian. Angka harapan hidup merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan salah satunya adalah *life expectancy*. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk.

Tabel 6. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2011-2019 (tahun)

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	70.92	71.09	71.26	71.39	71.43	71.57	71.70	71.91	72.21
Tabanan	72.18	72.35	72.52	72.64	72.74	72.89	73.03	73.23	73.53
Badung	73.91	74.05	74.19	74.30	74.31	74.42	74.53	74.71	74.99
Gianyar	72.43	72.57	72.71	72.78	72.84	72.95	73.06	73.26	73.56
Klungkung	69.45	69.66	69.84	69.91	70.11	70.28	70.45	70.70	71.06
Bangli	68.98	70.94	71.11	71.20	71.35	71.41	71.46	71.68	71.99
Karangasem	68.76	68.96	69.12	69.18	69.48	69.66	69.85	70.05	70.35
Buleleng	70.23	70.41	70.58	70.71	70.81	70.97	71.14	71.36	71.68
Denpasar	73.34	73.44	73.56	73.71	73.91	70.04	74.17	74.38	74.68

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020*

Kualitas kesehatan pada pencapaian angka harapan hidup periode tahun 2011-2019 pada kabupaten/kota terlihat masih cukup bervariasi. Meski tidak ada yang berada pada status rendah, dengan capaian ini dapat diartikan bahwa kesehatan penduduk berada di tingkat yang baik. Dilihat tiap wilayah terdapat dua kabupaten/kota berstatus memiliki angka harapan hidup yang tinggi di Provinsi Bali yakni Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dibandingkan pada lain sisi ada beberapa kabupaten/kota di dengan level sedang. Namun hal ini telah terjadi kenaikan angka harapan hidup dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang menandakan tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan

juga tinggi. Setiap daerah berusaha untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui *outcome* angka harapan hidup.

Deskripsi Data Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi variabel penelitian yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), maksimum, dan minimum.

Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Penduduk	81	.40	4.86	1.3636	1.04938
Pengangguran	81	.34	4.56	1.7730	.89030
Pendidikan	81	4.60	11.23	7.8521	1.64280
Kesehatan	81	68.76	74.99	71.9046	1.66616
Kemiskinan	81	1.52	7.44	4.8175	1.62212
Valid N (listwise)	81				

Sumber: *Data sekunder diolah, 2021*

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif data didapat bahwa sampel yang berjumlah 81 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk memiliki nilai minimal 0,40 persen yaitu menunjukkan persentase pertumbuhan penduduk terendah pada Kabupaten Klungkung tahun 2017. Nilai maksimal sebesar 4,86 persen yaitu menunjukkan persentase pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kabupaten Badung tahun 2011 dan rata-rata sebesar 1,3636 dengan standar deviasi sebesar 1,04938. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, yang artinya sebaran data terkait laju pertumbuhan penduduk pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.

2. Pengangguran memiliki nilai minimal 0,34 persen yaitu menunjukkan persentase tingkat pengangguran terendah terdapat pada Kabupaten Badung tahun 2015 dan 2016. Nilai maksimal sebesar 4,56 persen yaitu menunjukkan persentase tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada Kota Denpasar pada tahun 2011 dan rata-rata sebesar 1,7730 dengan standar deviasi sebesar 0,89030. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, yang artinya sebaran data terkait persentase tingkat pengangguran pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.
3. Tingkat Pendidikan memiliki nilai minimal 4.60 tahun yaitu menunjukkan rata-rata lama sekolah terendah terdapat pada Kabupaten Karangasem tahun 2011. Nilai maksimal sebesar 11,23 tahun yaitu menunjukkan rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat pada Kota Denpasar tahun 2019 dan rata-rata sebesar 7,8521 dengan standar deviasi sebesar 1,64280. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, yang artinya sebaran data terkait rata-rata lama sekolah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.
4. Kesehatan memiliki nilai minimal 68,76 tahun yaitu menunjukkan angka harapan hidup terendah terdapat pada Kabupaten Karangasem tahun 2011. Nilai maksimal sebesar 74,99 tahun yaitu menunjukkan angka harapan hidup tertinggi terdapat pada Kabupaten Badung tahun 2019 dan rata-rata sebesar 71,9046 dengan standar deviasi sebesar 1,66616. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, yang artinya sebaran

data terkait angka harapan hidup pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.

5. Kemiskinan memiliki nilai minimal 1,52 persen yaitu menunjukkan persentase penduduk miskin terendah terdapat pada Kota Denpasar tahun 2012. Nilai maksimal sebesar 7,44 persen yaitu menunjukkan persentase penduduk miskin tertinggi terdapat pada Kabupaten Karangasem tahun 2015 dan rata-rata sebesar 4,8175 dengan standar deviasi sebesar 1,62212. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, yang artinya sebaran data terkait persentase penduduk miskin pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah merata.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui data yang dipakai dalam penelitian memenuhi syarat yang ditentukan dalam model regresi. Beberapa hasil uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

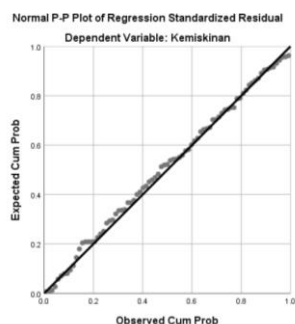
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah sampel pengujian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dikatakan data didistribusikan secara normal, dan akan berlaku sebaliknya.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.52247352
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.034
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: *Data sekunder diolah, 2021*

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *Kolmogorov-Sminarnov* (KS) sebesar 0,050 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 ($0,200 > 0,05$). Berdasarkan hasil grafik *p-p plot* diperoleh bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 2 Grafik P-P Plot

Sumber: *Data sekunder diolah, 2021*

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent, dengan melihat nilai

tolerance atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Variabel independen bisa dikatakan tidak multikolinearitas ketika nilai *tolerance* > 0,1 atau nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 (Ghozali, 2016).

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pertumbuhan penduduk	.600	1.667
Pengangguran	.776	1.288
Pendidikan	.136	7.355
Kesehatan	.136	7.375

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

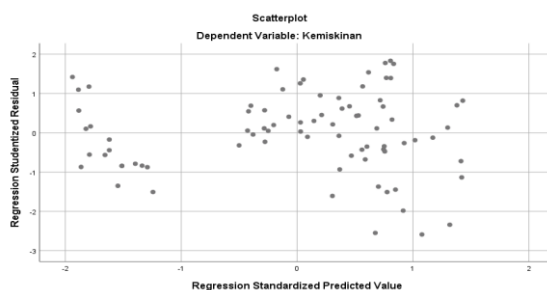
Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai *tolerance* dan VIF dari variabel pertumbuhan penduduk berturut-turut 0,600 dan 1,667; nilai *tolerance* dan VIF dari variabel pengangguran berturut-turut 0,776 dan 1,288; dan nilai *tolerance* dan VIF dari variabel tingkat pendidikan berturut-turut 0,136 dan 7,355; dan nilai *tolerance* dan VIF dari variabel kesehatan berturut-turut 0,136 dan 7,375 semua menunjukkan nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dengan menggunakan Uji *Rank Spearman*.

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations				
			X1	X2	X3	X4	ABS_RES1
Spearman's rho	Pertumbuhan penduduk (X1)	Correlation	1.000	.259*	.547**	.548**	.111
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.	.020	.000	.000	.323
		N	81	81	81	81	81
	Pengangguran (X2)	Correlation	.259*	1.000	.034	-.103	.082
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.020	.	.761	.362	.469
		N	81	81	81	81	81
	Pendidikan (X3)	Correlation	.547**	.034	1.000	.927**	-.194
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.000	.761	.	.000	.083
		N	81	81	81	81	81
	Kesehatan (X4)	Correlation	.548**	-.103	.927**	1.000	-.196
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.000	.362	.000	.	.079
		N	81	81	81	81	81
	ABS_RES1	Correlation	.111	.082	-.194	-.196	1.000
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.323	.469	.083	.079	.
		N	81	81	81	81	81

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai signifikansi dari variabel pertumbuhan penduduk sebesar 0,323, nilai signifikansi dari variabel pengangguran sebesar

0,469, nilai signifikansi dari variabel pendidikan sebesar 0,083 dan nilai signifikansi dari variabel kesehatan sebesar 0,079. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas juga dapat dilihat berdasarkan grafik *scatterplot*. Berdasarkan *output scatterplot* pada Gambar 4.2 terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi berfungsi untuk memperlihatkan pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam regresi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test).

Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.947 ^a	.896	.891	.53605	1.895

Sumber: *Data sekunder diolah, 2021*

Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai *Durbin-Watson* (d-hitung) sebesar 1,895 dengan signifikan sebesar 0,05 dan N = 81 dan jumlah variabel independen k = 4, maka diperoleh $du = 1,7438$ diperoleh nilai $(4 - du)$ sebesar $4 - 1,7438 = 2,2562$. Oleh karena nilai *Durbin-Watson* (d-hitung) sebesar 1,895 berada diantara 1,7438 dan 2,2562, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negative.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	26.468	6.389		4.143	.000
Pertumbuhan penduduk	-.536	.074	-.347	-7.271	.000
Pengangguran	.223	.076	.122	2.920	.005
Pendidikan	-.453	.099	-.459	-4.579	.000
Kesehatan	-.247	.098	-.254	-2.528	.014

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: *Data sekunder diolah, 2021*

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut:

Y : 26,468 -0,536 X_1 +0,223 X_2 -0,453 X_3 -0,247 X_4

SE : (6,389) (0,074) (0,076) (0,099) (0,098)

Sig. : (0,000) (0,000) (0,005) (0,000) (0,014)

Hasil ini menunjukkan seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,050. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan pada variabel terikatnya.

Pembahasan**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model yang digunakan. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R Square* adalah sebesar 0,891. Ini berarti naik turunnya tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pertumbuhan

penduduk, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan sebesar 89,1% sedangkan sisanya sebesar 10,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimunculkan di dalam model penelitian ini.

Uji Signifikansi Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) bertujuan mengetahui apakah semua variabel yang diidentifikasi tepat digunakan untuk memprediksi tingkat kemiskinan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh $F_{hitung} = 164,144 > 2,49$ dan nilai signifikansi $0,000 < (\alpha) = 0,05$ yang berarti bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2019. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa peningkatan laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup diikuti dengan perubahan tingkat kemiskinan.

Uji Signifikansi Regresi secara Parsial (Uji t)

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk (X1) terhadap kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} = -7,271 > 1,66488$ dan nilai signifikansi $0,000 < (\alpha) = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011-2019. Nilai koefisien regresi sebesar -0,536, menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan variabel Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Bali sebesar 1% maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 0,536%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali hal ini dikarenakan terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk dimana tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2019 dapat dikendalikan, hal tersebut terlihat dengan perkembangan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu tinggi. Besarnya penduduk produktif di Bali merupakan peluang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan akan bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat Bali. Hasil penelitian serupa juga didapat pada penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Kunto, (2016); Safitri dan Effendi, (2019); Ria, (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} = 2,920 > 1,66488$ dan nilai signifikansi $0,005 < (\alpha) = 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011-2019. Nilai koefisien regresi sebesar 0,223, menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali sebesar 1% maka tidak akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 0,223%.

Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya sedangkan kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Penelitian ini sejalan dengan yang

dilakukan oleh Aristina dkk (2017), Wirawan dan Arka (2015), Ayunita dan Darsana, (2019); Mohammed, *at al* (2015) bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pendidikan (X3) terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} = -4,579 > 1,66488$ dan nilai signifikansi $0,000 < (\alpha) = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2019. Nilai koefisien regresi sebesar -0,453, menyatakan bahwa ketika kenaikan variabel Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali sebesar 1 tahun maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 0,453%.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik yang diperlihatkan dengan peningkatan pendapatan dan konsumsinya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo *at al.* 2020; Purnomo dan Istiqomah, (2019); Purnomo, (2019) Iqraam dan Sudibia, (2019) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dalam penelitiannya diprosikan dari rata-rata lama sekolah signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pengaruh Kesehatan (X4) terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} = -2,528 > 1,66488$ dan nilai signifikansi $0,014 < (\alpha) = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

kesehatan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2019. Nilai koefisien regresi sebesar -0,247, menyatakan bahwa ketika kenaikan variabel Angka Harapan Hidup di Provinsi Bali sebesar 1 tahun maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 0,247%.

Tingkat kemiskinan akan terkait erat dengan tingkat kesejahteraan. Dengan meningkatnya SDM maka produktivitas golongan miskin akan naik, sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan akan menentukan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menurunkan angka kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia dkk, (2020); Anisa (2019); Suhartini (2017); variabel kesehatan yang diproksikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan bahwa kesehatan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel pertumbuhan penduduk, pendidikan, dan kesehatan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan analisis dan simpulan maka dapat disarankan sebagai berikut. Masyarakat diharapkan dalam penanganan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan dengan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah ada, tetapi sebagai masyarakat diharapkan turut andil dan mampu berinovasi, menggali potensi dalam diri pada segala bidang dan sektor. Dengan memiliki bekal sumber daya manusia yang berkualitas maka akan tercipta kesejahteraan dan efektifitas bagi masyarakat. Serta masyarakat ikut serta terlibat dalam kebijakan pemerintah guna menekan angka kemiskinan yang terjadi. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel lain dan periode penelitian, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kemiskinan. Selain itu perijinan kepada pihak Badan Pusat Statistik di Provinsi Bali perlu adanya komunikasi terlebih dahulu melalui media sosial yang dapat disampaikan secara online terkait dengan pengambilan data primer mengingat kondisi pandemi Covid-19

REFERENSI

- Anisa Putrizahrah. 2019. Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah wanita yang bekerja Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya*. Vol. 7, No. 2.
- Aristina, Ita. Budhi, Made Kembar Sri. Wirathi, I G.A.P. Darsana, Ida Bagus. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 6, No.5, pp. 677-704
- Arynda Kusuma Dewi, Muhammad Tanzil Furqon Randy Cahya Wihandika. 2020. Prediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Support Vector Regression (Studi Kasus: Kota Malang). Vol. 4, No. 1
- Ayunita Kristin dan Ida Bagus Darsana. 2019. Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 9, No. 6, pp. 1373 – 1401.

- Dwi Puspa Hambarsari, Kunto Inggit. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di JawaTimur Tahun 2004-2014. *JEB(Jurnal Ekonomi & Bisnis)*. Vol.1, No.2, pp. 257-282.
- Franca, Obi. 2015. Quality Entrepreneurial Education: Opportunities for Youth Development, Unemployment and Poverty Reduction in Nigeria. *Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER)*. Vol.2, No. 1.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqraam, Mohammad dan Sudibia, I Ketut 2019. Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesempatan Kerja, Dan Persentase Penduduk Sektor Informal Terhadap Kemiskinan di Provinsi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.8, No.7.
- Jeon, Shinyoung. 2013. Agricultural Transformation and the Escape from the Middle- IncomeCountry Trap: Challenges Facing Small Farmers in Indonesia in a Time of Green Restructuring. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 49, No. 3, pp. 383 – 384.
- Leker, Laura and Gregory Ponthiere. 2015. Education, Life Expectancy and Family Bargaining: theBen-Porath Effect Revisited. *Journal of Education Economics*, Vol. 23, No. 4, pp. 481.
- Leli Safitri, Muhammad Effendi. 2019. Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk, dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2, No. 4, pp. 842-851.
- Ordine, P., Rose, G. 2015. Educational Mismatch and Unemployment Scarring. *International Journal of Manpower*, Vol. 36, No. 5, pp. 733-763.
- Paulus Uppun. 2016. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan KB dan Pengendalian Kelahiran di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Piramida*. Vol. 12, No. 2, pp. 59 – 71.
- Palupi Lindiasari Samputra dan Adis Imam Munandar.2019. Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.12, No.1.
- Pokharel, Trilochan. 2015. Poverty in Nepal: Characteristics and Challenges. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 11, pp. 44-56
- Purnami, Ni Made Sasih.Saskara, Ida Ayu Nyoman. 2016. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.5, No.11.

- Purnomo, S. D. 2019. Determinan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *AL-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 11(1).
- Purnomo, S. D., Istiqomah, I., & Suharno, S. 2020. Hubungan Pendidikan Dan Kemiskinan: Pendekatan Variabel Mediasi Pendapatan Per Kapita. *EJurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 9, No. 6, pp. 539-560.
- Purnomo, S. D., Istiqomah, I., & Suharno, S. 2020. The Effect of Human Capital and Human Capital Spillover on Economic Growth, International Conference on Rural Development and Enterpreneurship 2019: *Enhancing Small Busniness and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0*. Vol. 5, No. 1.
- Ria Astuti Sampo. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Human Capital, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Tana Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*. Vol. 1, No.1.
- Ria Suadnyani, Ni Wayan dan Ida Bagus Darsana. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.7, No.5.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 10, No. 2
- Sudibia, I Ketut dan Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni. 2013. Beberapa Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. Vol. 1, No. 1, pp. 1-14.
- Suhartini, T, 2017, Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*. Vol. 5, No. 2, pp. 2338-4697.
- Werner, Tammy L. 2015. The War on Poverty and the Racialization of "Hillbilly" Poverty: Implications for Poverty Research. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*. Vol. 19, No. 3.
- Wirawan, I Made Tony. Arka, Sudarsana. 2015. Analisis Pengaruh Pendidikan, Pdrb Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Udayana*. Vol. 4, No.5.
- Yefriza. 2015. Managing Public Health Expenditure in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 1, pp. 147-148.
- Yunia Arien Fairizta, suharno, Nurul Anwar. 2020. Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 9, No.2, pp. 1207-1226.

